



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu disusun Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *E-Government* di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1134);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1008); Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem;
9. Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Kementerian, dan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan.

KETIGA : Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan disusun berdasarkan 7 (tujuh) klasifikasi yang meliputi:

1. Tata Kelola;
2. Manajemen;
3. Layanan;
4. Infrastruktur;
5. Aplikasi;
6. Keamanan; dan
7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

KEEMPAT : 7 (tujuh) klasifikasi Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dijabarkan dalam program dan/atau kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan.

KELIMA : Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

KEENAM : Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 16 Agustus 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NO	PROGRAM dan/atau KEGIATAN		PELAKSANA		WAKTU				
			Ketua Pokja	Pelaksana	2024	2025	2026	2027	2028
	SASARAN STRATEGIS	Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong							
	SASARAN PROGRAM	1. Tersedianya usulan kebijakan dan rencana tenaga kerja nasional berbasis ilmu pengetahuan							

		teknologi data dan informasi								
		2. Meningkatnya Tata Kelola manajemen internal Kementerian Ketenagakerjaan								
	Indikator	Tingkat Maturitas SPBE								
1	TATA KELOLA									
	A	Penyusunan Arsitektur SPBE								
		1	Perancangan kebijakan Arsitektur SPBE	Pusdatik	Biro OSDMA, Biro Perencanaan, Biro Hukum, Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan		√	√	√	√
		2	Sosialisasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Pusdatik	Seluruh unit kerja		√	√	√	√
		3	Evaluasi dan Monitoring penerapan kebijakan Arsitektur SPBE	Pusdatik	Seluruh unit kerja		√	√	√	√
	B	Penyusunan Peta Rencana SPBE								
		1	Perancangan kebijakan Peta Rencana SPBE	Pusdatik	Biro OSDMA, Biro Perencanaan, Biro Hukum, Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan		√	√	√	√
		2	Sosialisasi Kebijakan Peta Rencana SPBE	Pusdatik	Seluruh unit kerja		√	√	√	√

		3	Evaluasi dan Monitoring Peta Rencana SPBE	Pusdatik	Seluruh unit kerja					
	C	Penyusunan Standardisasi TI								
		1	Perancangan Standar TI	Pusdatik				√	√	√
		2	Sosialisasi Standar TI	Pusdatik	Seluruh unit kerja			√	√	√
		3	Evaluasi dan monitoring Standar TI	Pusdatik	Seluruh unit kerja			√	√	√
	D	Clearence Belanja TI Kemnaker								
		1	Penyusunan rencana Belanja TI	Pusdatik	Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal	√	√	√	√	√
		2	Pengajuan Rekomendasi Clearence TI	Pusdatik	Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal	√	√	√	√	√
		3	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Clearence	Pusdatik	Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal	√	√	√	√	√
	E	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi SPBE								
		1	Pengusul rapat koordinasi TIM koordinasi SPBE	Biro OSDMA	Pusdatik	√	√	√	√	√
		2	Pelaksanaan rapat koordinasi Tim koordinasi SPBE	Biro OSDMA	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	F	Penyusunan Pedoman Aset IT dan Data Center								
		1	Perancangan pedoman Aset TI dan Data Center	Pusdatik	Biro Umum, Biro Keuangan dan BMN		√			
		2	Sosialisasi pedoman Aset TI dan Data Center	Pusdatik	Seluruh unit kerja		√	√	√	√

		3	Evaluasi dan monitoring pedoman Aset TI dan Data Center	Pusdatik	Seluruh unit kerja		√	√	√	√
	G	Peningkatan Indeks SPBE								
		1	Evaluasi hasil penilaian pelaksanaan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan	Pusdatik	Biro OSDMA, Inspektorat Jenderal	√	√	√	√	√
		2	Reviu dan Tindak Lanjut Kebutuhan pelaksanaan SPBE	Pusdatik, Biro OSDMA	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	Pengunggahan data dukung penilaian pelaksanaan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan	Pusdatik, Biro OSDMA	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	H	Supervisi Layanan IT								
		1	Penyiapan materi supervisi layanan TI	Pusdatik		√	√	√	√	√
		2	Pelaksanaan supervisi layanan TI	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan supervisi layanan TI	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
2	MANAJEMEN									
	A	Manajemen Risiko SPBE								
		1	Penyusunan perencanaan manajemen Risiko SPBE	Inspektorat Jenderal						

			Dokumen Perencanaan	Inspektorat Jenderal		√	√	√	√	√
			a) Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
			b) konteks Risiko SPBE	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
			c) penilaian Risiko SPBE	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
			d) rencana penanganan Risiko SPBE	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		2	Penerapan Manajemen Risiko (identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi)	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	B	Manajemen Keamanan Informasi								
		1	Penyusunan perencanaan sistem manajemen Keamanan Informasi SPBE	Pusdatik		√				
		2	Operasional dan pemeliharaan Keamanan Informasi TIK	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	Sertifikasi <i>International Organization for Standardization</i> (ISO)	Pusdatik		√	√	√	√	√
	C	Manajemen Data								
		1	Penyusunan perencanaan manajemen Data SPBE	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√				
		2	Penyusunan <i>master</i> data ketenagakerjaan	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√

		3	Interoperabilitas data ketenagakerjaan	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		4	Integrasi data ketenagakerjaan	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		5	Penilaian Tingkat Kematangan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		6	Sosialisasi Pendampingan Implementasi SDK Daerah	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		7	Forum SDK	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		8	Sosialisasi Portal SDK	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	D	Manajemen Aset TI								
		1	Penyusunan perencanaan manajemen Aset TI	Pusdatik	Biro Umum, Biro Keuangan dan BMN	√				
		2	Operasional dan pemeliharaan Aset TIK	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	Penerapan dan evaluasi manajemen Aset TI	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	E	Manajemen Sumber Daya manusia								
		1	Penyusunan perencanaan Manajemen SDM IT	Biro OSDMA	Pusdatik	√				
		2	Penerapan dan evaluasi manajemen SDM TI (pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan)	Biro OSDMA	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	Pengembangan Kompetensi SDM IT	Biro OSDMA	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√

3	F	Manajemen pengetahuan SPBE								
		1	Penyusunan perencanaan manajemen pengetahuan SPBE	Biro OSDMA	Pusdatik	√	√	√	√	√
		2	Persiapan dan evaluasi manajemen pengetahuan	Biro OSDMA	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	<i>Sharing knowledge</i> SPBE	Biro OSDMA	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	H	Manajemen Layanan SPBE								
		1	Penyusunan rencana manajemen layanan SPBE	Pusdatik	Biro OSDMA	√				
		2	Penerapan dan evaluasi manajemen layanan mencakup pelayanan pengguna SPBE dan pengoperasian layanan SPBE yang menggunakan aplikasi pusat bantuan	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	LAYANAN									
	A	Layanan Dukungan Manajemen Berbasis Teknologi Informasi								
		1	Identifikasi layanan terintegrasi	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√				
		2	Identifikasi proses bisnis terintegrasi	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	Identifikasi data dan informasi	Pusdatik, Biro OSDMA	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		4	Integrasi layanan	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		5	Implementasi layanan terintegrasi	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		6	Sosialisasi layanan terintegrasi	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√

		7	Operasional layanan terintegrasi	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	B	Layanan Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas								
		1	Identifikasi layanan terintegrasi	Pusdatik	Binalavotas dan Pusat Pasar Kerja	√				
		2	Identifikasi proses bisnis terintegrasi	Pusdatik	Binalavotas dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		3	Identifikasi data dan informasi	Pusdatik	Binalavotas dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		4	Implementasi layanan terintegrasi	Pusdatik	Binalavotas dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		5	Integrasi layanan	Pusdatik	Binalavotas dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		6	Sosialisasi layanan terintegrasi	Binalavotas	Binalavotas dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		7	Operasional layanan terintegrasi	Pusdatik, Binalavotas	Binalavotas dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
	C	Layanan Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja								
		1	Identifikasi layanan terintegrasi	Pusdatik	Binapenta dan Pusat Pasar Kerja	√				
		2	Identifikasi proses bisnis terintegrasi	Pusdatik	Binapenta dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		3	Identifikasi data dan informasi	Pusdatik	Binapenta dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		4	Implementasi layanan terintegrasi	Pusdatik	Binapenta dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		5	Integrasi layanan	Pusdatik	Binapenta dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		6	Sosialisasi layanan terintegrasi	Binapenta	Binapenta dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		7	Operasional layanan terintegrasi	Pusdatik, Binapenta	Binapenta dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√

	D	Layanan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
		1	Identifikasi layanan terintegrasi	Pusdatik	Binwasnaker dan Pusat Pasar Kerja	√				
		2	Identifikasi proses bisnis terintegrasi	Pusdatik	Binwasnaker dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		3	Identifikasi data dan informasi	Pusdatik	Binwasnaker dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		4	Implementasi layanan terintegrasi	Pusdatik	Binwasnaker dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		5	Integrasi layanan	Pusdatik	Binwasnaker dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		6	Sosialisasi layanan terintegrasi	Binwasnaker	Binwasnaker dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		7	Operasional layanan terintegrasi	Binwasnaker	Binwasnaker dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
	E	Layanan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja								
		1	Identifikasi layanan terintegrasi	Pusdatik	PHI dan Jamsos TK dan Pusat Pasar Kerja	√				
		2	Identifikasi proses bisnis terintegrasi	Pusdatik	PHI dan Jamsos TK dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		3	Identifikasi data dan informasi	Pusdatik	PHI dan Jamsos TK dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		4	Implementasi layanan terintegrasi	Pusdatik	PHI dan Jamsos TK dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		5	Integrasi layanan	Pusdatik	PHI dan Jamsos TK dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
		6	Sosialisasi layanan terintegrasi	PHI dan Jamsos TK	PHI dan Jamsos TK dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√

		7	Operasional layanan terintegrasi	Pusdatik, PHI dan Jamsos TK	PHI dan Jamsos TK dan Pusat Pasar Kerja	√	√	√	√	√
4	APLIKASI									
	A	Optimalisasi dan Penambahan Fitur SIAPKerja								
		1	Manajemen pengelolaan Aplikasi	Pusdatik						
		2	Operasional aplikasi SIAPKerja	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SIAPKerja	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	B	Pengembangan Aplikasi Manajemen Internal								
		1	Manajemen pengelolaan Aplikasi	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		2	Operasional aplikasi Manajemen Internal Kementerian Ketenagakerjaan	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Manajemen Internal	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
5	INFRASTRUKTUR									
	A	Pengadaan Lisensi Infrastruktur IT dan Perkantoran								
		1	Identifikasi aset lisensi	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		2	Identifikasi kebutuhan perpanjangan lisensi infrastruktur dan perkantoran	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	Pengadaan perpanjangan lisensi	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√

		4	Operasional lisensi infrastruktur	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	B	Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur IT								
		1	Identifikasi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		2	Pengadaan perangkat infrastruktur	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		3	Operasional pemeliharaan infrastuktur TIK	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
6	KEAMANAN TIK									
	A	Penerapan <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT)								
		1	Identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap keamanan <i>cyber</i>	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
		2	Operasional CSIRT	Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	B	Konsultasi dan Evaluasi Keamanan Siber SPBE								
		1	Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait siber di Kementerian Ketenagakerjaan	Pusdatik		√	√	√	√	√
	C	Penerapan dan perpanjangan lisensi ISO 27001		Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√

	D	Optimalisasi Operasional Keamanan TIK		Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
7	AUDIT TIK									
	A	Audit Infrastruktur								
		1	Perencanaan dan pedoman terkait audit infrastruktur	Inspektorat Jenderal, Pusdatik		√	√	√	√	√
		2	Penerapan kegiatan audit infrastruktur SPBE bersama BRIN dan BSSN	Inspektorat Jenderal, Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√
	B	Audit Aplikasi								
		1	Perencanaan dan pedoman terkait audit Aplikasi SPBE	Inspektorat Jenderal, Pusdatik		√	√	√	√	√
		2	Penerapan kegiatan audit Aplikasi SPBE bersama BRIN	Inspektorat Jenderal, Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√

	C	Audit Keamanan Informasi								
		1	Perencanaan dan pedoman terkait keamanan informasi	Inspektorat Jenderal, Pusdatik		√	√	√	√	√
		2	Penerapan kegiatan audit keamanan informasi SPBE bersama BSSN	Inspektorat Jenderal, Pusdatik	Seluruh unit kerja	√	√	√	√	√

Ditetapkan di Jakarta
tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

